

BAB II

CHYNE, O'BRIEN DAN BELGRAVE: TEORI SOSIAL DEMOKRAT

A. Teori Sosial Demokrat

Untuk menjelaskan fenomena yang di angkat oleh peneliti yaitu POTRET KEMISKINAN MASYARAKAT DESA Studi Kasus Masyarakat Miskin Di Dusun Ngengo Desa Ngrancang Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro maka peneliti menggunakan teori sosial demokrat.

Teori sosial demokrat memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individual, melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber-sumber kemasyarakatan. Teori yang berporos pada prinsip-prinsip ekonomi campuran ini muncul sebagai jawaban terhadap depresi ekonomi yang terjadi pada tahun 1920-an dan awal 1930-an.

Kemiskinan bangsa ini berkaitan erat dengan struktur sosial yang ada, dimana rakyat mengalami ketidakberdayaan ketika menghadapi struktur sosial dalam menghadapi struktur sosial di dalam mengubah sedikit nasibnya.³⁵ Dalam perspektif modernisasi faktor utama yang menyebabkan kemiskinan adalah etos kerja, tidak dimilikinya etika wirausaha atau budaya yang tidak terbiasa dengan kerja keras. Akan tetapi, berbeda dengan perspektif modernisasi yang berpendapat bahwa sumber yang menyebabkan kemiskinan adalah struktur yang tidak adil dan ulah kelas sosial yang

³⁵ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2001), 803

berkuasa, yang sering kali mengeksploitasi masyarakat miskin dengan kekuasaan dan kekayaan yang dimilikinya.

Jika kemiskinan disebabkan karena struktur yang ada maka sama halnya dengan kemiskinan struktural, yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Struktur sosial yang berlaku telah melahirkan berbagai rintangan yang menghalangi kelompok miskin ini untuk maju. Umpamanya kelemahan ekonomi tidak memungkinkan mereka untuk memperoleh pendidikan yang berarti agar dapat melepaskan diri dari kemelaratan. Dengan keterbatasan dan ketidakpunya modal dan ketrampilan menyebabkan mereka tidak memiliki peluang untuk usaha dalam rangka mengubah statusnya sebagai kelompok miskin.

kemiskinan yang secara langsung maupun tidak disebabkan oleh tatanan kelembagaan atau struktur sosial dalam masyarakat. Tatanan kelembagaan atau struktur sosial disini dapat diartikan sebagai tatanan organisasi maupun aturan permainan yang diterapkan. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah seringkali menyebabkan sebagian kelompok dalam masyarakat mengalami kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi lebih disebabkan keterbatasan bahkan tidak dimilikinya akses kelompok miskin kepada sumber daya-sumber daya pembangunan yang ada. Kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial yang berlaku ini telah menyebabkan terkurungnya kelompok masyarakat tertentu dalam suasana kemiskinan, yang bahkan telah berlangsung secara turun temurun. Kemiskinan

struktural hanya dapat diatasi jika terjadi suatu proses perubahan struktur dalam masyarakat secara mendasar.

Kemiskinan yang di derita atau di alami oleh suatu anggota masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber- sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan ini muncul bukan karena ketidaksanggupan si miskin untuk bekerja, melainkan karena ketidakmampuan struktur dan sistem sosial dalam menyediakan kesempatan yang memungkinkan si miskin ini dapat bekerja.³⁶

Pada dasarnya, kemiskinan merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks, problema sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan. Kemiskinan mempunyai beberapa dimensi yang patut kita tahu dan kaji kebenarannya.

Pertama, kemiskinan itu dimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan juga memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, kemiskinan meliputi aspek primer yakni miskin akan aset-aset, organisasi sosial dan politik, dan pengetahuan serta ketrampilan. Sedangkan aspek sekunder yakni miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi.

³⁶ Elly M. Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*. Op.Cit, 803

Kedua, aspek-aspek kemiskinan tersebut saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti bahwa kemajuan atau kemunduran pada suatu aspek akan berpengaruh pada kemajuan dan kemunduran aspek lainnya.³⁷

Ketiga, bahwa yang miskin adalah manusiannya, baik individual maupun kolektif. Ada kemiskinan pedesaan dan juga kemiskinan perkotaan namun ini berarti bukan desa atau kota yang mengalami kemiskinan, tetapi orang-orang atau manusianya yang mengalami kemiskinan.

Kemiskinan akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa. Meskipun sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan ataupun solusi penanganan kemiskinan yang dianggap paling signifikan, dan relevan, pengkajian konsep dan strategi penanganan kemiskinan harus terus menerus diupayakan. Pengupayaan tersebut tentu sangat berarti sehingga kemiskinan tidak lagi menjadi masalah dalam kehidupan manusia.

Sistem negara kesejahteraan yang menekankan pentingnya manajemen dan pendanaan negara dalam pemberian pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan jaminan sosial, sangat dipengaruhi oleh pendekatan “ekonomi manajemen-permintaan” (*demand-management economics*) gaya Keynesian ini.³⁸

³⁷ Hadi Prayitno dan M Umar Burhan, *Pembangunan Ekonomi Pedesaan* (Yogyakarta: BPFE), 146-147

³⁸ <http://bayualfian.blogspot.com/2012/10/teori-kemiskinan-dan-kebiakan-yang-di.html> (diakses pada tanggal 27 Nopember 2014)

Meskipun tidak setuju sepenuhnya terhadap sistem pasar bebas, kaum sosial demokrat tidak memandang sistem ekonomi kapitalis sebagai evil. Bahkan kapitalis masih dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling efektif. Hanya saja, kapitalisme perlu dilengkapi dengan sistem negara kesejahteraan agar lebih berwajah manusiawi. “*The welfare state acts as the human face of capitalism,*” demikian menurut Cheyne, O’Brien dan Belgrave.³⁹

Pendukung sosial demokrat berpendapat bahwa kesetaraan merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan.⁴⁰ Kemandirian dan kebebasan ini akan tercapai jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber bagi potensi dirinya, seperti pendidikan, kesehatan yang baik, dan pendapatan yang cukup. Kebebasan disini bukan sekedar bebas dari pengaruh luar melainkan bebas pula dalam menentukan pilihan-pilihan (*choices*). Dengan kata lain, kebebasan berarti memiliki kemampuan (*capabilities*) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya, kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya, kemampuan menghindari kematian dini, kemampuan menghindari kekurangan gizi, kemampuan membaca, menulis dan berkomunikasi.

Negara memiliki peranan dalam menjamin bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam transaksi-transaksi kemasyarakatan yang memungkinkan mereka menentukan pilihan pilihannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Peran

³⁹Ibid 79

⁴⁰ Syuhyuti, *30 Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan Dan Pertanian, Penjelasan Konsep, Istilah Teori, Dan Indikator Serta Variabel* (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2006), 95

Negara dalam pendekatan ini cukup penting terutama dalam merumuskan strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Menurut pandangan sosial demokrat, strategi kemiskinan haruslah bersifat institusional (melembaga), misalnya melalui program jaminan sosial. Salah satu contohnya adalah pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun, akan dapat meningkatkan kebebasan, hal ini dikarenakan tersedianya penghasilan dasar sehingga orang akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya, dan sebaliknya ketiadaan penghasilan tersebut dapat menyebabkan ketergantungan. Ketiadaan pelayanan dasar tersebut juga dapat menyebabkan ketergantungan (dependency) karena dapat membuat orang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya.

Pendukung sosial demokrat meyakini bahwa penanggulangan kemiskinan yang bersifat residual, beorientasi proyek jangka pendek, justru merupakan strategi yang hanya menghabiskan dana saja karena efeknya juga singkat, terbatas dan tidak berwawasan pemberdayaan dan keberlanjutan. Apabila kaum neoliberal melihat bahwa jaminan sosial dapat menghambat “kebebasan”, kaum sosial demokrat justru meyakini bahwa ketiadaan sumber-sumber finansial yang mapan itulah yang justru dapat menghilangkan “kebebasan”, karena membatasi dan bahkan menghilangkan kemampuan individu dalam menentukan pilihan-pilihannya (*choices*).⁴¹

⁴¹ Syuhyuti, *30 Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan Dan Pertanian, Penjelasan Konsep, Istilah Teori, Dan Indikator Serta Variabel* (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2006), 95

Kelemahan teori ini adalah adanya ketergantungan yang tinggi pada negara dalam membentuk struktur dan institusi untuk menanggulangi kemiskinan. Padahal pencapaian pembentukan struktur dan institusi yang tepat dalam menangani kemiskinan itu sendiri tergantung pada kapabilitas kelompok miskin. Hal ini dikarenakan kemiskinan tidak dilihat dari kebutuhan minimal yang harus dicapai tapi lebih pada rata-rata kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Namun demikian pendekatan ini membuka dimensi lain dari penyebab kemiskinan yaitu pada struktur dan institusi, yang telah menyebabkan tertutupnya akses bagi kelompok tertentu dalam masyarakat. Sehingga melalui pendekatan ini dapat dilihat bahwa akar permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar pada kemampuan individu tetapi bagaimana struktur dan institusi dalam masyarakat memberikan jaminan bagi semua kelompok untuk mendapatkan kesetaraan dalam mencapai kemandirian dan kebebasan.

Secara konseptual memandang bahwa kemiskinan merupakan persoalan-persoalan struktural sebagaimana diformulasikan oleh kaum sosial demokrat. Dilihat dari tingkatannya, ada tiga kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerjaan sosial, yaitu:

1. Kelompok yang paling miskin (destitute) atau yang sering didefinisikan sebagai fakir miskin. Kelompok ini secara absolut memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan (umumnya tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali) serta tidak memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial.

2. Kelompok miskin (poor). Kelompok ini memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan namun secara relatif memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar (misalnya, masih memiliki sumber-sumber finansial, memiliki pendidikan dasar atau tidak buta huruf).
3. Kelompok rentan (vulnerable group). Kelompok ini dapat dikategorikan bebas dari kemiskinan, karena memiliki kehidupan yang relatif lebih baik ketimbang kelompok destitute maupun miskin. Namun sebenarnya kelompok yang sering disebut “near poor” (agak miskin) ini masih rentan terhadap berbagai perubahan sosial di sekitarnya. Mereka seringkali berpindah dari status “rentan” menjadi “miskin” dan bahkan “destitute” bila terjadi krisis ekonomi dan tidak mendapat pertolongan sosial.

Robert Chambers, seorang ahli pedesaan berkebangsaan inggris yang pertama kali menggunakan kemiskinan terpadu untuk memahami masalah kemiskinan di Negara sedang berkembang.⁴² Membeberkan masalah kemiskinan struktural sebenarnya terletak pada perangkat kemiskinan, yang terdiri atas lima unsur:

1. Kemiskinan itu sendiri
2. Kelemahan fisik
3. Keterasingan atau kadar isolasi
4. Kerentanan
5. Ketidakberdayaan.

⁴²Loekman Soetrisno, *Kemiskinan: Perempuan dan pemberdayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 18

Kemiskinan yang diderita keluarga miskin tak jarang harus memaksa mereka bekerja mebanting tulang untuk mencari nafkah. Kemiskinan telah membuat asupan makanan keluarga miskin menjadi kurang, dan bisa berpengaruh terhadap kesehatan fisik mereka. Sehingga masyarakat miskin sangat rentan dalam berbagai hal apapun yang bisa mengantarkan mereka kedalam lingkaran kemiskinan.

Kelemahan fisik atau jasmani yang di alami seseorang mendorongnya kearah kemiskinan melalui berbagai cara yaitu: produktivitas tenaga kerja yang sangat rendah, tidak mampu bekerja lebih lama, tubuh yang lemah, membuat seseorang tersisih karena tidak ada waktu tidak kuat menghadiri pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan informasi baru. Jasmani yang lemah juga memperpanjang kerentanan seseorang karena terbatasnya kemampuan untuk mengatasi krisis keadaan darurat.⁴³

⁴³ Robert Chambers, *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang* (Jakarta: LP3ES, 1987), 146